



RANCANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017-2022

**Disampaikan pada :
MUSRENBANG RPJMD KAB. HSU Tahun 2017-2022
Amuntai, 25 Januari 2018**



DOKUMEN RPJMD

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

(UU NO 25 TH 2004 TTG PPN)

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN

**Permendagri
No.86 Tahun 2017**



Latar Belakang



Maksud Penyusunan RPJMD



Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi daerah tahun 2017 - 2022

TUJUAN PENYUSUNAN RPJMD :

1

Mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan pemerintahan dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah

2

Merumuskan visi dan misi melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah

3

Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif

4

Sebagai bahan acuan dalam menyusun Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD

5

Menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah

6

Memudahkan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur

Dasar Hukum Penyusunan RPJMD

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 – 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025;
7. Aturan perundang-undangan lainnya.

PERMASALAHAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

- **Permasalahan kesehatan** : kematian bayi dan ibu melahirkan ; prevalensi gizi kurang dan buruk ; cakupan jaminan kesehatan ; penggunaan teknologi alat kesehatan ; budaya hidup bersih ; penyalah gunaan napza ; penyakit menular ; pengelolaan limbah medis ; dll.
- **Permasalahan pendidikan** : APK/APM ; angka putus sekolah ; distribusi tenaga pengajar/guru ; PAUD ; minat baca siswa ; dll.
- **Permasalahan lainnya** : Pembinaan dan sarana prasarana kepemudaan ; pembinaan dan sarana prasarana keolahragaan ; pembinaan kebudayaan daerah ; kepariwisataan ; pemerintahan dan aparatur ; pencatatan sipil dan kependudukan ; pemberdayaan gender ; penyandang masalah sosial ; pemberdayaan masyarakat dan desa ; ketenagakerjaan ; ketertiban umum ; dll.

PERMASALAHAN BIDANG EKONOMI

- ❖ UKM dan koperasi ;
- ❖ investasi di daerah ;
- ❖ ketahanan pangan ;
- ❖ Produksi, produktivitas dan pemasaran hasil-hasil pertanian dan perikanan ;
- ❖ kualitas dan SDM petani ;
- ❖ illegal fishing ;
- ❖ alih fungsi lahan pertanian ;
- ❖ permasalahan pedagang kaki lima ;
- ❖ kebutuhan pasar desa/tradisionil ;
- ❖ ketergantungan bahan baku industri kecil ;
- ❖ ketersediaan tenaga kerja berkualitas di sektor industri ;
- ❖ penguasaan teknologi informasi dalam pemasaran IKM;
- ❖ kualitas dan design produk industri kecil ;
- ❖ segmentasi pasar ; dll.

Permasalahan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

- ✓ **Ketersediaan sarana prasarana infrastruktur/publik**
- ✓ **infrastruktur dasar ;**
- ✓ **layanan transportasi dan parkir;**
- ✓ **Ruang Terbuka Hijau ;**
- ✓ **Perumahan dan kawasan kumuh perkotaan ;**
- ✓ **sarana dan prasarana jalan dan jembatan ;**
- ✓ **perhubungan ;**
- ✓ **energi alternatif/terbarukan ;**
- ✓ **penyediaan irigasi dan saluran ;**
- ✓ **alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ;**
- ✓ **pemanfaatan ruang ;**
- ✓ **masalah lingkungan dan persampahan ;**
- ✓ **pertanahan ;**
- ✓ **komunikasi dan informasi ;**
- ✓ **statistik ;**
- ✓ **persandian dan penataan ruang ; dll.**

ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL

ISU INTERNAL

Isu-isu yang ada dan berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

ISU EKSTERNAL

1. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
2. Sustainable Development Goals (SDGs)
3. Isu Provinsi
4. Isu Nasional

**Tata Kelola
Birokrasi efektif
dan efisien**

**Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pencapaian target
SDG's**

**Pengentasan
status
Kabupaten
Tertinggal**

**Pertumbuhan
Ekonomi
Berkualitas**

**Peningkatan
Daya Saing
Perekonomian
Daerah**

**Pembangunan dan
Pengembangan
Pariwisata Berbasis
Potensi Lokal**

**Peningkatan
Infrastruktur
Dasar**

**Peningkatan
Pelayanan Umum
(transportasi,
komunikasi dan
informatika)**

**Peningkatan
Pengelolaan LH**

**ISU INTERNAL
YANG
ADA/BERKEM-
BANG DI KAB.
HSU**

ISU EKSTERNAL

1. ME A

(Masyarakat
Ekonomi Asean)

Prinsip-prinsip yang terkandung pada pemberlakuan MEA ini adalah terbuka, mengarah ke luar dan mengarah pada pasar ekonomi yang teguh pendirian dengan peraturan multilateral serta patuh terhadap terhadap sistem untuk pelaksanaan dan komitmen ekonomi yang efektif berdasarkan aturan.

2. SDG's

(Sustainable
Development Goals)

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yg layak
9. Industri, inovasi, dan infrastruktur
10. Pengurangan kesenjangan
11. Keberlanjutan kota dan komunitas
12. Konsumsi dan poduk yang bertanggung jawab
13. Aksi terhadap iklim
14. Kehidupan bawah laut
15. Kehidupan di darat
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian &
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.



ISU EKSTERNAL

3. Isu Strategis PROVINSI

1. Kalsel Cerdas
2. Kalsel Sehat
3. Kalsel Terampil
4. Kalsel Beriman
5. Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik
6. Kalsel Berbudaya
7. Kalsel Aman
8. Kalsel Menuju Tuan Rumah PON
9. Kalsel dengan Infrastruktur yang Berkualitas
10. Kalsel Senta Pangan
11. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional
12. Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa
13. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas

4. Isu Strategis NASIONAL

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
2. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan
3. Sinergi dalam pengembangan industri dan perdagangan berbasis agroindustri
4. Indonesia Berkarakter dalam pembangunan pendidikan

Visi BUPATI

“Kabupaten Hulu Sungai Utara **MANTAP**”

MAJU

menggambarkan tentang kondisi yang lebih baik yang dicapai oleh masyarakat Hulu Sungai Utara diakhir periode kepemimpinan kepala daerah pada seluruh aspek kehidupan

MANDIRI

menggambarkan keadaan dimana pemda dpt mendayagunakan potensi lokal dan sumberdaya yg tersedia, memiliki ketahanan terhadap berbagai dinamika global yg berlangsung, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan & masalah yg ada di sekitarnya shg mampu secara optimal menggunakan sumberdaya yg dimilikinya

SEJAHTERA

mengandung pemahaman ttg kondisi kehidupan masy yg semakin baik ditinjau dari aspek pendapatan yg diperoleh, akses terhadap tingkat penddikan yang ditempuh serta akses terhadap layanan kesehatan yg lebih berkualitas dlm kehidupannya sehari-hari

AGAMIS

menggambarkan tentang kondisi masyarakat yg tetap kondusif dlm menjalankan kegiatan keagamaan berdasarkan nilai-nilai keagamaan yg menjadi ciri dan identitas masy HSU

PRODUKTIF

dapat diartikan sbg kemampuan personal/aparatur pemerintahan dan lembaga pemerintah dlm menghasilkan karya yg bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan



MISI DAERAH

- 1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif**
- 2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah**
- 3. Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Lokal dengan Berlandaskan Potensi Daerah**
- 4. Membangun infrastruktur Daerah yang Terintegrasi dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Lokal**
- 5. Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam**

Misi 1

Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif

Sasaran

TUJUAN I

Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

1

Meningkatnya pelayanan publik yang prima

2

TUJUAN II

Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan daerah

Meningkatnya kapasitas fiskal/pembiayaan daerah

3

Strategi dan Arah Kebijakan

St-1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah
4 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-2. Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik
3 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-3. Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah yang profesional
1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-4. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi kependudukan
1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-5. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan PAD
1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Misi 2

Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN III

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan

4

St-6. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

4 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

5

St-7. Peningkatan Promosi Kesehatan

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-8. Peningkatan kualitas layanan kesehatan

3 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

6

St-9. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

2 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-10. Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi, kebijakan pengarusutamaan Gender

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak

7

St-11. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Menekan laju pertumbuhan penduduk

8

St-12. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan KB

4 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Misi 2 (lanjutan...)

Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah

Sasaran

TUJUAN IV

Meningkatkan kemandirian dan peran pemuda serta prestasi olahraga

Meningkatnya
Meningkatnya
Prestasi serta sarana
dan prasarana
olahraga

9

Meningkatnya
Prestasi serta sarana
dan prasarana
olahraga

1
0

Strategi dan Arah Kebijakan

St-13. Meningkatkan SDM pemuda dalam kepeloporan dan kepemimpinan
1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-14. Peningkatan sarana prasarana olahraga
1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

TUJUAN V

Memelihara kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif

Terselenggaranya
kehidupan sosial
masyarakat yang
kondusif dan agamis

1
1

St-15. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum
2 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-16. Meningkatnya kerukunan antar dan inter umat beragama
1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Misi 3

Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Lokal dengan Berlandaskan Potensi Daerah

Sasaran

TUJUAN VI

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya Produksi Hasil-Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan

1
2

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

1
3

Berkembangnya peran ekonomi kreatif Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)

1
4

Meningkatkan kualitas dan Kuantitas seni dan budaya serta kunjungan wisata

1
5

Menciptakan tenaga kerja produktif yang siap dan mampu diserap lapangan kerja

1
6

Penurunan Kemiskinan

1
7

Strategi dan Arah Kebijakan

St-17. Revitalisasi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

4 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-18. Penguatan Ketahanan Pangan

4 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-19. Pemberdayaan IKM, UMKM dan Koperasi

3 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-20. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-21. Pengembangan kualitas dan kuantitas seni dan budaya serta pariwisata lokal

3 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-22. Pengembangan kemampuan kerja dan berusaha (wirausaha)

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-23. Pengembangan Program Padat Karya dan Usaha Produktif

1 Arah Kebijakan

St-24. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-25. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan

3 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Misi 4

Membangun infrastruktur Daerah yang Terintegrasi dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Lokal

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN VII

**Meningkatkan
daya dukung
infrastruktur di
daerah**

**Meningkatnya jangkauan
dan kualitas infrastruktur
perhubungan, Komunikasi
dan informasi**

1
8

St-26. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan

3 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-27. Meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi dan informatika

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan

1
9

St-28. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan dan irigasi

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman

2
0

St-29. Peningkatan cakupan layanan air bersih

3 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-30. Penurunan tingkat kekumuhan di perkotaan 2 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-31 Peningkatan cakupan sanitasi dasar layak

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-32 Pemenuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Meningkatnya Kelembagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

2
1

St-33. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

Misi 5

Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam

TUJUAN VIII

Sasaran

Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan

Terlindunginya sumberdaya hayati dan sumber daya alam/lahan berupa hamparan rawa yang dikelola dengan memperhatikan kaidah kelestariannya, ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal

2
2

Strategi dan Arah Kebijakan

St-29. Perlindungan kawasan khusus

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-31 Peningkatan Kualitas Udara

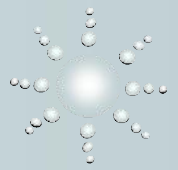
1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

St-32 Peningkatan Kualitas Air Baku

1 Arah Kebijakan (lihat tabel)

PROGRAM PRIORITAS DAERAH

- 1. Kinerja Pemerintah Daerah**
- 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
- 3. Ketahanan Pangan**
- 4. Pengurangan Kemiskinan**
- 5. Peningkatan Perekonomian Daerah dan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal**
- 6. Peningkatan Daya Saing Daerah**
- 7. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**



Indikator
Kinerja Daerah
(Indikator Tujuan
dan sasaran)

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 - 2022

No.	Indikator	Target Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.45	5.70	5.95	6.00	6.00
2	Pendapatan Perkapita (Rp)	18,283,500	19,537,750	20,792,000	22,046,250	23,300,500
3	Usia Harapan Hidup (tahun)	63.07	63.25	63.43	63.61	63.79
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)	7.18	7.3	7.43	7.55	7.55
5	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	80,50	81.00	81,50	82.00	83.00
6	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (%)	7,28	7,30	7,32	7,35	7,35
7	Persentase penduduk miskin (%)	6.26	6.01	5.76	5.51	5.26
8	Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	43.61	45.74	48.48	51.52	54.56
9	Jembatan Dalam Kondisi Baik (Buah)	349	351	353	355	357
10	Rasio Jaringan Irigasi (%)	18.72	19.49	20.27	21.25	22.42
11	Penduduk yang mengakses Air bersih (%)	82.26	86.32	90.84	96.81	100
12	Penduduk yang mempunyai sanitasi layak (%)	70.5	79.39	85.72	93.91	100
13	Indeks Kualitas Air	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan	cemar ringan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD KAB. HSU

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 15 menyebutkan bahwa:
“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”
1. Permendagri No:67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan pada pasal 2 ayat 1:
“Gubernur dan Bupati/Walikota WAJIB melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”



Tujuan dari pelaksanaan KLHS adalah:

- 1. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD**
- 2. Meningkatkan kualitas RPJMD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

Dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD, Pemerintah Kab. HSU didampingi oleh tenaga ahli dan tenaga teknis dari Universitas Lambung Mangkurat, yang terdiri dari:

1. Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS (Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Menristek RI)
2. Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si
3. Ir. Karta Sirang, MS
4. Dr. Badaruddin, S.Hut, MP
5. Dr. Ichsan Ridwan, S.Si, M.Kom



HASIL FGD I DAN FGD II

Berdasarkan hasil FGD I dan II dengan seluruh stakeholder di Kab. HSU, maka didapat ISU SANGAT PRIORITAS dari Pembangunan Berkelanjutan, yang terdiri dari:

1. Isu Lingkungan :

- a) Alih Fungsi Lahan
- b) Banjir

2. Isu Ekonomi :

- a) Pertumbuhan Ekonomi
- b) Pengembangan Agribisnis

3. Isu Sosial

- a) Pendidikan Karakter
- b) Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

Tahapan selanjutnya dalam penyusunan KLHS ini adalah Tim Pokja beserta tenaga ahli akan menganalisa KAJIAN PENGARUH terhadap Isu Sangat Prioritas ini dengan program yang ada di dalam dokumen RPJMD Kab. HSU.







TERIMA KASIH



Lanjutkan